

WORKSHOP
PERAN MASYARAKAT DALAM PEMBANGUNAN WILAYAH
MELALUI PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN
DAN COMMUNITY EMPOWERMENT PROGRAM JICA- MEETING

Pendahuluan

Pembangunan dalam arti luas bukanlah sekedar pertumbuhan nilai-nilai ekonomi, namun juga realisasi spiritual dan nilai-nilai lain. Strategi pembangunan ekonomi yang ada perlu diimbangi dengan pendekatan komprehensif. Terutama pendekatan yang mampu memulihkan sikap percaya diri masyarakat yang mengalami kemerosotan akibat kemiskinan, dampak dari pembangunan maupun factor penyulit baru, misalnya bencana alam.

Dalam kaitannya dengan pembangunan wilayah, pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah segenap program yang ada saat ini mampu memenuhi tuntutan pengembangan sector modern dan memperkecil ketidakseimbangan yang ada hubungannya dengan disparitas seperti : pusat –pinggiran, kota besar-daerah luar kota, pendekatan terprogram-inisiatif masyarakat.

Tujuan Lokakarya

Lokakarya ini diharapkan mampu memberikan inspirasi dan kajian berlanjut dalam menerapkan pendekatan kontekstual. Pendekatan yang tidak hanya bertumpu pada pengembangan ekonomi, namun seutuhnya menyangkut nilai-nilai yang menggerakkan dan sekaligus menjadi tujuan akhir pembangunan wilayah.

Tujuan khusus yang diharapkan adalah : (1) Berbagi pengalaman dan saling belajar dengan arahan beberapa peran masyarakat sipil dalam mendukung pembangunan wilayah melalui promosi kewirausahaan. (2) Teridentifikasi berbagai pelajaran penting yang bermanfaat tentang pembangunan wilayah dari program pemberdayaan masyarakat termasuk yang dilaksanakan di daerah rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh dan Nias. (3). Teridentifikasi berbagai pelajaran penting dari kunjungan langsung dalam hal

- (a). Hubungan antara sektor modern dengan pembangunan wilayah dalam kasus PPEI/Pusat Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia.
- (b) Hubungan antara sektor perkotaan dengan pembangunan wilayah dari kegiatan yayasan SEKAR.
- (c) Hubungan antara kelembagaan inisiatif masyarakat dengan pembangunan wilayah, dari kegiatan Promosi tanaman keluarga (TOGA) di kelurahan Gandaria Jakarta. Selain itu tujuan lain adalah berbagi pengalaman di antara NGO local partner JICA Indonesia.

Proses Lokakarya

Lokakarya diselenggarakan selama dua hari pada tanggal 13-14 Maret 2006 di Hotel Milenium, Jakarta. Lokakarya dihadiri oleh 159 peserta dari unsur-unsur Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, LSM mitra CEP-JICA dan LSM lain, Lembaga Donor dan NGO Internasional, Sektor Swasta, serta Perguruan Tinggi.

Proses Lokakarya dibagi dalam 3 garis besar, 1) Kerangka dalam memahami kewirausahaan pada pembangunan wilayah dilihat dari 3 sisi, yaitu dari sisi pemerintah, lembaga dana dan dari LSM. 2) Kerangka memahami kewirausahaan dalam kondisi umum dan kondisi khusus untuk daerah pasca bencana. 3) Presentasi kasus dampingan Lokal NGO dan JICA dalam melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan kewirausahaan dan kunjungan lapangan.

Hasil Lokakarya

Didapat beberapa butir pembelajaran penting, diantaranya:

1. Dari sisi pemerintahan, system desentralisasi dapat mendorong pemberdayaan masyarakat, menumbuhkan kreativitas serta meningkatkan partisipasi masyarakat. Jadi kata kunci desentralisasi adalah partisipasi masyarakat lokal secara aktif. Mendorong tumbuhnya motivasi, inisiatif dan kreativitas masyarakat merupakan tantangan tersendiri dalam proses pembangunan, sehingga masyarakat mampu mandiri.

2. Peran-peran yang harus diambil oleh pemerintah, terutama: 1) Menciptakan kebijakan yang kondusif sebagai regulator sehingga suasana lebih bergairah dan berusaha dan berpartisipasi dalam kegiatan. 2) Berperan sebagai fasilitator yang menyediakan kemudahan-kemudahan agar masyarakat makin berkembang

Namun, pemerintah mempunyai keterbatasan dalam birokrasi, sedangkan LSM mempunyai keahlian spesifik dan dapat memberikan pelayanan masyarakat secara terperinci. Peran yang harus diambil oleh LSM: 1) Sebagai pioneer yang dirasakan pada pengembangan model dan pendekatan pengembangan. 2) Sebagai katalisator berbagai actor pembangunan, baik lembaga pemerintah maupun lembaga lain. Dan 3) Melakukan advokasi tentang kebijakan pemerintah yang berpihak kepada public.

Adapun keterbatasan pendanaan, diharapkan dapat diambil alih oleh sektor swasta sehingga pembangunan menyeluruh dan berkelanjutan dapat tercapai.

3. Rehabilitasi dan rekonstruksi di Aceh merupakan peristiwa anomali, ibarat orang yang biasa minum air 8 liter dipaksa minum 8 galon. Dengan bantuan yang sangat besar, tanpa economic development plan yang bagus, akan terjadi orang menjual kembali hartanya setelah serah terima bantuan selesai. Sehingga untuk kasus Aceh dan Nias, penekanan terpenting dalam pembangunan dan pengembangan wilayah adalah ekonomi kerakyatan, sehingga investasi yang masuk tidak merusak ekonomi kerakyatan.

Dari presentasi pengalaman pelaksanaan CEP dan kunjungan lapangan didapat beberapa pelajaran, terutama tentang kontribusi kegiatan LSM maupun kelompok-kelompok masyarakat yang berwirausaha terhadap pembangunan wilayah:

- 1) Membantu pemerintah daerah dalam menyusun konsep pengembangan klaster produk unggulan.
- 2) Mewujudkan model pendampingan kawasan DAS untuk direplikasikan di daerah lain oleh dinas terkait.

- 3) Meningkatnya partisipasi masyarakat dan munculnya tradisi demokrasi di kalangan CSO (Community Self –reliance Organization),
- 4) Terbangunnya jaringan antara CSO lokal dan regional,
- 5) Adanya kesadaran untuk menjaga lingkungan dengan menggunakan alat tangkap yang tidak merusak lingkungan, mengembangkan tanaman obat keluarga, mengembangkan daur ulang sampah.
- 6) Masyarakat mulai kritis terhadap kebijakan pembangunan, terlibat dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program sehingga memberikan pengalaman pada masyarakat untuk memikirkan strategi dan konsep pembangunan di kampungnya.
- 7) Mampu menumbuhkan kembali aktivitas dan roda perekonomian masyarakat akibat bencana dengan program rehabilitasi dan rekonstruksi.
- 8) Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan masyarakat/pengusaha lokal dalam hal ekspor-impor, dan peningkatan mutu produk.
- 9) Menciptakan lapangan kerja alternatif.
- 10) Memberi solusi pemecahan masalah sosial anak jalanan dan masalah ekonomi anak yatim.
- 11) Meningkatkan kesejahteraan keluarga (kesehatan & pendapatan).